

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

(Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016)

Tazkia Karin Manurung

Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Universitas Telkom
tazkiakarin@telkomuniversity.ac.id

Astrie Krisnawati

Program Studi Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, Universitas Telkom
astriekrisnawati@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Tujuan_ Penelitian ini untuk mengetahui penerapan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) yang baik terhadap manajemen pajak perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016.

Desain/Metode_ Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik sampling berupa *purposive sampling*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh signifikan dari masing-masing proksi tata kelola perusahaan yang baik terhadap proksi manajemen pajak.

Temuan_ Hasil penelitian ini yaitu secara simultan dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Secara parsial dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Implikasi_ Penelitian ini dapat menjadi pertimbangan perusahaan sub sektor perkebunan untuk memperhatikan *good corporate governance* sehingga bisa memperbaiki manajemen pajak di dalam perusahaan.

Originalitas_ Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif regresi data panel dengan menggunakan Eviews 10.0.

Tipe Penelitian_ ini tergolong penelitian kausal berupa studi kasus empiris.

Kata Kunci : tata kelola perusahaan yang baik, dewan komisaris, komisaris independen, kompensasi, manajemen pajak, tarif pajak efektif

I. Pendahuluan

Terdapat banyak perusahaan yang ingin mendapatkan manfaat dari pajak tetapi lalai dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini sering terjadi karena adanya masalah agensi (*agency problem*) yang dialami oleh perusahaan (Warsono *et al*, 2009:10). *Agency problem* adalah masalah yang muncul karena perbedaan informasi antara pemegang saham sebagai pihak yang memberikan amanat dengan manajemen sebagai pihak yang menerima amanat untuk mengelola perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan *moral hazard* bagi manajemen karena manajemen bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan keuntungan lebih dalam jangka pendek, bukan keuntungan jangka panjang seperti yang diharapkan oleh pemegang saham (Minnick dan Noga, 2009).

Manajemen berkewajiban dalam memilih strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik dan efisien. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1996). Manajemen pajak menangani perusahaan dalam pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal tersebut dapat membuat pemegang saham melihat perusahaan mempunyai *value* dan manfaat bagi mereka karena berpengaruh terhadap tingginya tingkat pengembalian kepada mereka (Irawan dan Farahmita, 2012).

Perencanaan pajak yang efektif dapat melalui penggunaan tarif pajak efektif (*effective tax rate /ETR*). Karayan dan Swenson (2007), mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. ETR merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari ETR kemudian menjadi suatu perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Lanis dan Richardson, 2011).

Strategi manajemen pajak yang dipilih perusahaan sangat bergantung pada struktur *governance* yang ada. Kebutuhan *good corporate governance* (GCG) dilihat dari latar belakang praktis adalah pengalaman Amerika Serikat yang harus melakukan restrukturisasi *corporate governance* akibat *market crash* pada tahun 1929. Sedangkan dari latar belakang akademis, kebutuhan GCG timbul berkaitan dengan prinsip *agency problem* yang muncul dalam perusahaan (Retno & Priantinah, 2012). Mekanisme *Corporate Governance* dibutuhkan sebagai bagian penting karena merupakan hal yang krusial untuk penerapan *corporate governance* secara lebih baik. Mekanisme *governance* dikategorikan berdasarkan karakteristik menjadi internal dan eksternal dari sebuah korporasi. Karena pembahasan *good corporate governance* yang berhubungan dengan manajemen pajak maka mekanisme pengendalian internal yang akan dibahas karena terdiri dari direksi dan dewan komisaris. Proksi yang digunakan untuk penelitian ini adalah dewan komisaris, komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi (Lukviarman, 2016:61).

Literatur mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen pajak telah ditemukan. Salah satunya penelitian Meilinda dan Cahyonowati (2013) yang meneliti Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak. Proksi *corporate governance* penelitian ini yaitu jumlah dewan komisaris, presentase komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan dan beda tarif pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah dewan komisaris, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan dan tingkat hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sementara komisaris independen, kompensasi dan beda tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

II. Kajian Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terkait dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan (Wulandari, 2001:17). Teori keagenan didasarkan pada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (*ownership and control*). Pemisahan antara kepemilikan

dan pengendalian dapat merupakan bentuk efisien dari perusahaan dalam kerangka perspektif “serangkaian kontrak” perusahaan merupakan serangkaian kontrak yang mencakup cara dimana input diproses untuk menghasilkan output dan cara dimana hasil dari output dibagi diantara input. (Wulandari, 2001:18).

Manajemen Pajak (ETR)

Manajemen pajak sebagai kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang (Minnick dan Noga, 2009). Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar hukum. Manajemen pajak mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya. Manajemen pajak memiliki 3 fungsi, yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*) (Irawan dan Farahmita, 2012). GAAP ETR yang memperhitungkan pajak kini dan pajak tangguhan digunakan dalam memperhitungkan manajemen pajak (Minnick dan Noga, 2009).

Good Corporate Governance

Good Corporate governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama pada hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. GCG dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera (Zarkasyi, 2008:36).

Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan komisaris. Fungsi komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Egon Zehnder International (2000), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance*, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.

Komisaris Independen

Menurut Herwidayatmo (2000) komisaris independen dapat membantu memberikan kontinuitas dan objektivitas yang diperlukan bagi suatu perusahaan untuk berkembang dan makmur. Dalam FCGI (2002) keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Bursa Efek Jakarta melalui peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000, dikemukakan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa harus memiliki komisaris independen yang proporsional. Proporsional yang dimaksudkan adalah memiliki jumlah perbandingan yang sama dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham minoritas (*non-controlling shareholders*). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal komisaris independen adalah 30% dari seluruh anggota dewan komisaris.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan direksi

Kompensasi adalah bentuk balas jasa organisasi atas pelaksanaan tugas yang diembankan kepada individu di dalam organisasi. Kompensasi menjadi hak yang harus diperoleh oleh individu karena mereka secara sukarela telah mengorbankan waktu, tenaga

dan pikirannya untuk melaksanakan mandat organisasi. Tujuan dari kompensasi adalah untuk menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan kepentingan pengelola aset. Kompensasi dapat memberikan insentif jangka panjang dengan menggunakan bentuk insentif *stock option* maupun memberikan insentif jangka pendek dengan menggunakan kompensasi dalam bentuk uang (Meilinda dan Cahyowati, 2013).

Pengembangan Hipotesis
Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Pajak

Menurut Egon Zehnder International (2000) dewan komisaris adalah wakil dari para pemegang saham yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen dan mencegah pengendalian yang terlalu banyak di tangan manajemen. Adanya hubungan antara jumlah dewan komisaris dengan keefektifan fungsi pengawasan. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah dewan komisaris semakin banyak. Hal ini terjadi karena semakin besar perusahaan akan semakin banyak membutuhkan penasihat. Minnick dan Noga (2009) menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak.
 H1 : Jumlah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

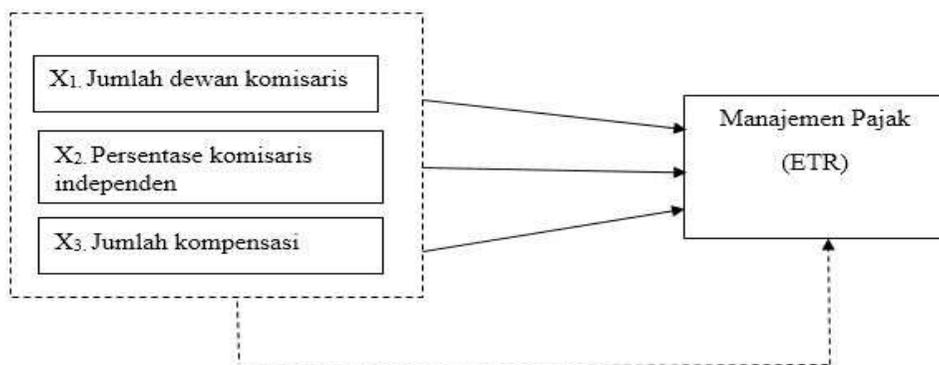
Komisaris Independen Terhadap Manajemen Pajak

Dalam penelitian Minnick dan Noga (2009) menjelaskan bahwa adanya nilai positif terhadap nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham serta memberikan pendorong yang signifikan dari kinerja *bottom line*. Perusahaan yang berukuran besar dan memiliki struktur yang kompleks akan maksimal kinerjanya apabila jumlah komisaris independen semakin banyak.
 H2 : Persentase komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Terhadap Manajemen Pajak

Minnick dan Noga (2009) menunjukkan hubungan negatif yang signifikan antara kompensasi dengan tingkat pembayaran pajak perusahaan. Manajemen pajak merupakan tujuan jangka panjang, maka diperkirakan perusahaan yang memberikan kompensasi yang tinggi akan berinvestasi lebih dalam hal manajemen pajak yang dapat meminimalisasi tingkat pajak efektif.
 H3 : Jumlah kompensasi untuk dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

III. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 sebanyak 16 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari *purposive sampling* dengan membagi berdasarkan kriteria kriteria yang ditentukan. Teknik pengumpulan penelitian ini bersumber dari laporan keuangan dan *company report* di BEI. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif regresi data panel

IV. Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai *mean, median, minimum, maximum* dan standar deviasi. Hasil Penelitian Statistik deskriptif adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	ETR	BOARD	INDEP	COMP
Mean	0.298286	5.120000	38.07302	1.022076
Median	0.269468	5.000000	33.33333	1.107549
Maximum	0.721572	9.000000	50.00000	1.716767
Minimum	0.042774	3.000000	33.33333	0.408406
Std. Dev.	0.130503	1.833030	6.383475	0.414649

Sumber : Data Sekunder yang Diolah

Nilai rata-rata yang dimiliki oleh ETR sebesar 0,298286 yang menunjukkan rata-rata ETR sub sektor perkebunan periode 2012-2016 sebesar 29,8% dari total keseluruhan *effective tax rate*. Untuk dewan komisaris yang disimbolkan dengan BOARD diperoleh nilai sebesar 5,12 yang menunjukkan jumlah dewan komisaris sub sektor perkebunan periode 2012-2016 rata-rata sebesar 5,12 dari total keseluruhan dewan komisaris. Mean komisaris independen yang disimbolkan dengan INDEP sebesar 38,07302 yang menunjukkan rata-rata presentase komisaris independen sebesar 38,07302 dari total keseluruhan komisaris independen. Selanjutnya untuk kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi yang disimbolkan dengan COMP diperoleh mean sebesar 1,022076 yang menunjukkan rata-rata kompenasi dewan komisaris dan dewan independen sub sektor perkebunan periode 2012-2016 rata-rata sebesar 1,022076 dari total keseluruhan.

Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dimana memiliki 3 model yaitu *fixed effect, common effect* dan *random effect*. Untuk mengetahui model mana yang tepat maka dilakukan uji Chow dan uji Hausman.

Tabel 2 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	8.924978	(4,17)	0.0005
Cross-section Chi-square	28.285012	4	0.0000

Sumber : Ouput Eviews 10.0

Berdasarkan tabel 2 diperoleh hasil probabilitas di *Cross-section* Chi-square sebesar 0,0000. Maka penelitian ini menggunakan *fixed effects model*. Tetapi selanjutnya dilakukan uji hausman untuk menentukan model mana yang lebih tepat.

Tabel 3 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.383268	3	0.0387

Sumber : Ouput Eviews 10.0

Berdasarkan tabel 3 diperoleh probabilitas (*cross-section random*) sebesar 0,0387. Berarti model yang tepat untuk penelitian ini yaitu *fixed effects model*. Berikut di tabel 4.4 ditampilkan hasil *fixed effects model*:

Tabel 4 Fixed Effect Model

Dependent Variable: ETR				
Method: Panel Least Squares				
Date: 12/18/17 Time: 05:32				
Sample: 2012 2016				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 5				
Total panel (balanced) observations: 25				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.457544	0.233328	1.960953	0.0665
BOARD	0.043153	0.020852	2.069459	0.0541
INDEP	-0.018510	0.004953	-3.737064	0.0016
COMP	0.317513	0.130443	2.434104	0.0262
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.749288	Mean dependent var	0.298286	
Adjusted R-squared	0.646054	S.D. dependent var	0.130503	
S.E. of regression	0.077641	Akaike info criterion	-2.019111	
Sum squared resid	0.102477	Schwarz criterion	-1.629071	
Log likelihood	33.23889	Hannan-Quinn criter.	-1.910931	
F-statistic	7.258138	Durbin-Watson stat	3.006377	
Prob(F-statistic)	0.000418			

Sumber : Outpout Eviews 10.0

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa variabel independen yang terdiri dari dewan komisaris, indep dan comp berpengaruh sebesar 0.749288 atau 74,49 % terhadap manajemen pajak (ETR). Dari Tabel 4.7 diketahui nilai konstanta koefisien dalam bentuk persamaan :

$$ETR = 0.457544 + 0.043153 DK - 0.018510 INDEP + 0.317513 COMP \quad (1)$$

Persamaan ETR tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. $C = 0.457544$ diartikan jika dewan komisaris, INDEP dan COMP memiliki nilai 0, maka koefisien ETR memiliki nilai 0.457544.
2. $\beta_1 = 0.043153$ diartikan apabila terjadi perubahan kenaikan DK sebesar 1 satuan dan variabel lain tetap, maka DK mengalami kenaikan sebesar 0.043153 satuan.
3. $\beta_2 = -0.018510$ diartikan apabila terjadi perubahan kenaikan INDEP sebesar 1 satuan dan variabel lain tetap, maka ETR mengalami kenaikan sebesar -0.018150 satuan.
4. $\beta_3 = 0.317513$ diartikan apabila terjadi perubahan kenaikan COMP sebesar 1 satuan dan variabel lain tetap, maka ETR mengalami kenaikan sebesar 0.317513 satuan.

Uji Simultan F

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat prob (*F-statistic*) sebesar 0,000418 dimana dibawah 0,05. Maka variabel independen *good corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen pajak yang diproksikan dengan ETR.

Uji Parsial t

Tabel 4.5 Hasil Uji Pengaruh Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.457544	0.233328	1.960953	0.0665
BOARD	0.043153	0.020852	2.069459	0.0541
INDEP	-0.018510	0.004953	-3.737064	0.0016
COMP	0.317513	0.130443	2.434104	0.0262

Sumber : Output Eviews 10.0

Berdasarkan gambar 5.2 dapat dijabarkan bahwa :

- a. Dewan komisaris yang disimbolkan dengan BOARD memiliki nilai probabilitas yang dimiliki sebesar 0,0541 dimana lebih besar dari 0,05. Maka H_0 diterima yang artinya dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
- b. Komisaris independen yang disimbolkan dengan INDEP memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0016 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak yang artinya komisaris independen memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
- c. Kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi yang disimbolkan dengan COMP nilai probabilitas sebesar 0,0262 lebih kecil dari 0,05. Maka H_0 ditolak yang artinya kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

V. Penutup Kesimpulan

Setelah mendapatkan hasil analisis dan pembahasan pada variabel independen *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen dan

kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi terhadap variabel dependen manajemen pajak yang diprosikan dengan ETR maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jumlah dewan Komisaris tertinggi dimiliki oleh PT. London Sumatera Tbk. pada tahun 2012 yang berjumlah 9 dan terendah dimiliki oleh PT. Salim Ivomas Pratama Tbk. pada tahun 2015 dan PT. Tunas Baru Lampung dari tahun 2012-2016 yang berjumlah 3. Presentase komisaris independen dimiliki oleh PT. Sampoerna Agro Tbk. pada tahun 2012-2015 yaitu 50% dan terendah dimiliki oleh PT. Salim Ivomas Pratama dan PT. Tunas Baru Lampung tahun 2012-2016, PT. Astra Agro Lestari tahun 2014 dan PT. PP London Sumatera tahun 2015-2016 sebesar 33,33%. Presentase kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi tertinggi dimiliki oleh PT. London Sumatera Indonesia Tbk. pada tahun 2012 sebesar 171,6% dan terendah dimiliki oleh PT. Tunas Baru Lampung Tbk. pada tahun 2014 sebesar 40,8%.
2. Nilai ETR tertinggi dimiliki oleh PT. Sampoerna Agro Tbk. Pada tahun 2016 sebesar 0,721 dan terendah dimiliki oleh PT. Astra Agro Lestari Tbk. Pada tahun 2016 sebesar 0,042.
3. Dewan komisaris tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
4. Komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
5. Kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi memiliki berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
6. Pengaruh dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak pada perusahaan sub sektor perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016.

Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, penelitian selanjutnya dapat memproksikan *good corporate governance* dengan proksi lain seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan konstitusional, komite audit, *indeks corporate governance* serta komponen-komponen *corporate governance* lainnya.
2. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan jenis industri lainnya yang terdaftar di BEI untuk mengetahui perbandingan pengungkapan *good corporate governance* terhadap industri lainnya.
3. Pengukuran terhadap dewan komisaris dan dewan komisaris independen bukan hanya berdasarkan jumlah, disarankan berdasarkan faktor lain seperti kompetensi, latar belakang pendidikan dan kualitas kerja.
4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi manajemen pajak.

Daftar Pustaka

- Egon Zehnder International. (2000). *Corporate Governance and the Role of the Board of Directors*
- FCGI (*Forum For Corporate Governance In Indonesia*). (2002). *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) The Essence of Good Corporate Governance : Konsep dan Implementasi Perusahaan Publik dan Korporasi Indonesia*. Yayasan Pendidikan Pasar Modal Indonesia & *Synergy Communication*: Jakarta.
- Herwidayatmo. (2000). *Implementasi Good Corporate Governance Untuk Perusahaan Publik Indonesia*.
- Irawan, Hendra Putra., dan Farahmita, Aria. (2012). *Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan - Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi* . 15.
- Karayan, John E. And Charles W. Swenson. (2007). *Strategic Business Tax Planning*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

- Lukviarman, Niki. (2016). *Corporate Governance: Menuju Penguatan Konseptual dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Era Adicitra Intermedia.
- Lumbantoruan, Shopar. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Meilinda, Maria dan Cahyonowati, Nur. (2013). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak – *Diponegoro Journal of Accounting*. 2 (3), 1.
- Minnick, Kristina., and Noga, Tracy. (2009). *Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management?* – *Journal of Corporate Finance*. 16 (5), 703-718.
- Retno M, Reny Dyah dan Priantinah, Denies. (2012). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010) – *Jurnal Nominal* 1 (1).
- Warsono, Sony dkk. (2009). *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: *Center For Good Corporate*.
- Wulandari, Ety Retni. (2001). *Good Corporate Governance Konsep, Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia.
- Zarkasyi, Muh Wahyudin. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya* (cetakan kesatu). Bandung: Alfabeta.